



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHATARINA MULIANA GIRLANG
2. Jabatan : STAF AHLI MENTERI BIDANG REGULASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. NHK : 58727

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.700.000.000

1. Tanah Seluas 2514 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4400 m2/100 m2 di BEKASI, HASIL
SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 2500 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.067.000.000

1. MOBIL, SUZUKI PICK UP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000
2. MOBIL, SUZUKI PICK UP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000
3. MOBIL, TOYOTA LIGHT TRUCK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000
6. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 689.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	272.782.156
F. HARTA LAINNYA	Rp.	160.000.000
Sub Total	Rp.	3.888.782.156
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.888.782.156

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.